



Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang

Trimerta Kirana Modok^{1*}, Laurensius P. Sayrani², Delila A.N. Seran³,
I Putu Yoga B. Pradana⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: trikirana10@gmail.com¹, laurensiussayrani@staf.undana.ac.id², delila.seran@staf.undana.ac.id³,
yoga.pradana@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: trikirana10@gmail.com

Abstract *The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national strategic initiative aimed at improving students' nutritional status and strengthening human resource quality. However, the large budget allocation and implementation complexity require effective, transparent, and accountable governance. This study aims to analyze the governance of the MBG Program in Kupang City based on management, transparency, and accountability aspects. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. Informants were selected using purposive sampling, including representatives from the Education Office, SPPG, schools, and student beneficiaries. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that administratively the program implementation complies with technical guidelines; however, substantive gaps remain. Menu planning is centralized and minimally participatory, procurement and distribution mechanisms have not fully met transparency and quality control standards, student socialization is limited, and reporting as well as complaint handling systems remain internally oriented and insufficiently documented. Therefore, the governance of the MBG Program in Kupang City is still predominantly administrative in nature and requires strengthened participation, transparency, and integrated oversight systems to ensure sustainable impacts on students' nutritional improvement.*

Keywords: *Accountability; Free Nutritious Meal Program; Governance; Public Policy; Transparency.*

Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik serta mendukung kualitas sumber daya manusia. Namun, besarnya alokasi anggaran dan kompleksitas pelaksanaan menuntut tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola Program MBG di Kota Kupang berdasarkan aspek pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas Dinas Pendidikan, SPPG, pihak sekolah, dan siswa penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan MBG telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun secara substantif masih terdapat kesenjangan implementasi. Perencanaan menu bersifat sentralistik dan kurang partisipatif, mekanisme pengadaan dan distribusi belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan pengendalian mutu, sosialisasi kepada siswa belum optimal, serta sistem pelaporan dan tindak lanjut aduan masih bersifat internal dan belum terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, tata kelola MBG di Kota Kupang masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan memerlukan penguatan partisipasi, transparansi, serta sistem pengawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi agar program berdampak berkelanjutan terhadap peningkatan gizi peserta didik.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kebijakan Publik; Program Makan Bergizi Gratis; Tata Kelola; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pemenuhan gizi yang baik merupakan faktor fundamental dalam mendukung tumbuh kembang anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi berdampak pada gangguan perkembangan kognitif dan rendahnya kapasitas berpikir kritis (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Oleh karena itu, pola makan bergizi seimbang yang mencakup prinsip beraneka ragam, bersih, dan cukup sesuai kebutuhan individu menjadi sangat penting dalam

mendukung pertumbuhan, daya tahan tubuh, serta pencegahan penyakit tidak menular. Kesadaran terhadap urgensi tersebut mendorong pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi dan produktivitas, terutama bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat (Kompas, 2025) sebagai upaya menekan stunting dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa MBG berdampak positif terhadap kesehatan siswa dan penurunan ketidakhadiran akibat sakit (Qomarullah et al., 2025). Selain manfaat kesehatan, program ini juga mendukung perekonomian lokal melalui pelibatan UMKM, petani, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan (Kemenkeu, 2025). Namun, dalam implementasinya muncul berbagai permasalahan seperti kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi, keterlambatan distribusi, serta kendala pembayaran kepada mitra katering (Tempo, 2024). Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan tata kelola pada level pelaksanaan. Di sisi lain, besarnya alokasi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2025 (Kompas, 2025) serta rencana pemangkasan biaya satuan hingga Rp7.500 per porsi (CNBC Indonesia, 2024) menimbulkan perdebatan publik terkait efektivitas dan akuntabilitas program.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, MBG telah diimplementasikan di berbagai sekolah dengan melibatkan yayasan sebagai vendor penyedia makanan. Meskipun terdapat contoh pelaksanaan yang berjalan baik, masih ditemukan kasus keterlambatan distribusi dan kendala logistik (Tribunnews, 2025) yang berdampak pada efektivitas program di sekolah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan, koordinasi, dan manajemen distribusi yang lebih transparan dan akuntabel. Mengingat belum adanya kajian akademik yang secara khusus menganalisis tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi berbasis bukti guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program di tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Tata Kelola (Governance)

Tata kelola (governance) dipahami sebagai proses pengelolaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel (Asaduzzaman, 2020).

Kaufmann et al. (2000) menjelaskan governance melalui tiga dimensi utama, yaitu proses pemilihan dan pengawasan pemerintah, kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, serta partisipasi masyarakat dalam ruang publik. United Nations E-Government (2014) menegaskan bahwa governance pada dasarnya adalah proses pengambilan dan implementasi keputusan. Dengan demikian, tata kelola yang baik (good governance) tercermin dari efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (Anggara, 2012; Syuroh, 2009).

Ruang Lingkup Governance

Dalam perspektif UNDP, IMF, dan LAN-RI, tata kelola melibatkan tiga aktor utama yang dikenal sebagai triple helix atau triangle actor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Sujarwoto, 2013). Pemerintah berperan menciptakan stabilitas politik dan hukum, sektor swasta menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas serta pendorong partisipasi publik (Sentanu, 2024). Sinergi ketiga aktor tersebut menjadi prasyarat utama terciptanya tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fungsi Governance

Fungsi tata kelola mencakup proses manajerial yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Lloyd & Aho, 2020). Bourne (2014) menambahkan enam fungsi utama governance, yakni: (1) menetapkan tujuan dan visi organisasi; (2) menentukan standar etika dan nilai; (3) membangun budaya organisasi; (4) merancang kerangka tata kelola; (5) memastikan akuntabilitas manajemen; dan (6) menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa governance tidak hanya berkaitan dengan struktur formal, tetapi juga nilai, budaya, dan mekanisme pengawasan.

Model dan Pendekatan Governance

Pierre dan Peters (2005) mengklasifikasikan model governance ke dalam beberapa bentuk, seperti etatiste, liberal-democratic, state-centric, Dutch governance school, dan governance without government, yang dibedakan berdasarkan kapasitas pengendalian negara dan interaksi sosial antaraktor. Pendekatan lain meliputi collaborative governance, network governance, market governance, dan hierarchical governance (Susilawati & Deden, 2023). Nadjib dan Khairunnas (2024) membagi model governance menjadi model birokrasi tradisional, partisipatif, jaringan, dan digital governance, serta pendekatan hierarkis, desentralisasi, dan kolaboratif. Secara umum, perkembangan model governance menunjukkan pergeseran dari pendekatan hierarkis menuju pendekatan kolaboratif dan partisipatif.

Aspek-Aspek Governance

Governance yang baik ditandai oleh beberapa aspek utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum dan keadilan, kesetaraan dan inklusi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis mufakat (Sentanu, 2024). Partisipasi publik penting dalam meningkatkan legitimasi kebijakan (Rahendro, 2012), sementara supremasi hukum menjadi dasar stabilitas pemerintahan (Cahyono, 2023). Transparansi dan akuntabilitas berperan menjaga kepercayaan publik (Irawan, 2018; Samel & Firiani, 2018), sedangkan efisiensi memastikan penggunaan sumber daya secara optimal (UNDP, 1996).

Pentingnya Governance

Tata kelola yang baik menjadi kunci tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Governance yang kuat menciptakan lingkungan yang stabil, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kerja sama antar lembaga, serta mendukung posisi negara dalam hubungan regional dan global. Dengan demikian, governance bukan hanya isu administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu daerah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus penelitian mencakup tiga aspek tata kelola, yaitu: (1) pengelolaan program yang meliputi perencanaan menu gizi seimbang, pengadaan bahan makanan, distribusi ke sekolah, dan koordinasi antarinstansi; (2) transparansi yang mencakup keterbukaan informasi anggaran dan sosialisasi program; serta (3) akuntabilitas yang meliputi laporan realisasi anggaran, pertanggungjawaban distribusi bahan makanan, dan tindak lanjut aduan masyarakat.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2012), yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan terdiri atas pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, perwakilan SPPG, wakil sekolah penerima program, serta siswa penerima manfaat. Pemilihan informan didasarkan pada peran dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program MBG.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat semi-terstruktur, serta studi dokumentasi terhadap laporan program, kebijakan, dan data anggaran. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sujarweni (2014), yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Wijaya, 2018) guna memastikan kredibilitas dan konsistensi data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kupang berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan membandingkan praktik lapangan terhadap ketentuan normatif dalam Juknis Badan Gizi Nasional (BGN). Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang, Kepala dan Wakil Kepala Sekolah (SMA Negeri 4 dan SMP Negeri 5 Kupang), Kepala SPPG Kelapa Lima Oesapa Barat, serta siswa sebagai penerima manfaat.

Pengelolaan Program

a. Perencanaan Menu Gizi Seimbang

Perencanaan menu sepenuhnya dilakukan oleh SPPG dan ahli gizi dengan mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang dan ketentuan BGN. Sekolah dan Dinas Pendidikan tidak dilibatkan dalam penyusunan menu, melainkan hanya berperan dalam pengawasan distribusi dan pengecekan makanan.

Klaim pelibatan siswa melalui “survei preventif” tidak didukung instrumen formal seperti kuesioner atau forum umpan balik. Evaluasi menu hanya didasarkan pada jumlah sisa makanan (ompreng), sehingga bersifat reaktif dan belum memenuhi prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Juknis BGN halaman 96.

Temuan ini menunjukkan perencanaan menu masih bersifat top-down dan teknokratis, dengan keterlibatan penerima manfaat yang bersifat implisit, bukan partisipatif. Kesenjangan ini berpotensi menurunkan efektivitas program dalam mencapai tujuan perbaikan status gizi siswa.

b. Pengadaan Bahan Makanan

Pengadaan dilakukan oleh SPPG melalui koordinasi dengan Yayasan No Fitu Timor dan pemasok (UMKM, CV, petani, pedagang). Pengendalian mutu dilakukan saat bahan diterima di dapur melalui pengecekan fisik dan penimbangan.

Namun, pemilihan supplier belum dijelaskan berdasarkan kriteria terukur seperti sertifikasi keamanan pangan, rekam jejak distribusi, kapasitas suplai, maupun kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk pangan asal hewan sebagaimana diatur dalam Juknis BGN halaman 100.

Ketiadaan mekanisme seleksi tertulis dan penilaian berbasis standar menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan masih lemah serta berpotensi bergantung pada pertimbangan subjektif.

c. Penyaluran ke Sekolah

Distribusi dilakukan melalui koordinasi antara SPPG dan PIC sekolah, dengan penyesuaian jadwal sesuai jam istirahat. Namun, keterlambatan distribusi masih sering terjadi.

Menurut Juknis BGN halaman 107, makanan harus sampai dalam kondisi segar dan tepat waktu. Praktik di lapangan menunjukkan adanya rentang waktu panjang antara proses memasak (mulai sekitar pukul 02.00 dini hari) dan konsumsi siswa, tanpa dukungan fasilitas penghangat. Kondisi ini berisiko menurunkan mutu dan keamanan makanan.

Dengan demikian, manajemen waktu distribusi belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan kualitas sebagaimana diatur dalam pedoman resmi.

d. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi SPPG dengan sekolah berjalan relatif aktif, terutama dalam verifikasi data siswa melalui Aplikasi Alur dan pelaporan ke pusat.

Sebaliknya, koordinasi Dinas Pendidikan dengan sekolah bersifat situasional dan reaktif. Laporan umumnya dilakukan secara lisan melalui telepon atau WhatsApp tanpa mekanisme tertulis baku.

Padahal, Juknis BGN halaman 44–45 menempatkan Dinas Pendidikan sebagai mitra strategis dalam monitoring, hygiene, sanitasi, dan edukasi gizi. Praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi lapangan.

Transparansi

a. Informasi Anggaran dan Pelaporan

Secara administratif, pengelolaan dana MBG mengikuti mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) dengan virtual account dan pelaporan rutin (dua mingguan, bulanan, tahunan). Juknis BGN mencatat total alokasi RKA TA 2025 sebesar Rp71 triliun.

Namun, di lapangan informasi anggaran hanya disampaikan secara umum (misalnya Rp8.000–Rp10.000 per porsi), sedangkan rincian penggunaan dana bersifat internal dan terpusat di BGN. SPPG tidak memiliki kewenangan menyampaikan detail kepada publik.

Sentralisasi kewenangan ini membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan membuat transparansi bersifat vertikal kepada negara, tetapi lemah secara horizontal kepada publik.

b. Sosialisasi Program

Sekolah menganggap sosialisasi telah dilakukan melalui rapat guru dan penyampaian umum kepada orang tua. Namun, wawancara dengan siswa menunjukkan sebagian besar tidak mengetahui asal-usul, tujuan, maupun mekanisme MBG.

Sosialisasi SPPG lebih berfokus pada persetujuan sekolah menerima program, bukan edukasi menyeluruh kepada siswa. Selain itu, juknis tidak memuat panduan teknis tentang mekanisme sosialisasi kepada penerima manfaat.

Kesenjangan ini menunjukkan komunikasi program belum efektif dan pemahaman siswa sebagai penerima manfaat utama masih rendah.

Akuntabilitas

a. Laporan Realisasi Anggaran

Pelaporan keuangan dilakukan secara terpusat oleh BGN. SPPG hanya dapat memberikan informasi umum, sementara dokumen rinci tidak dapat diakses publik.

Padahal, Juknis BGN (prinsip “5 Pas”) menekankan bahwa operasional harus akuntabel, transparan, dan dapat diverifikasi. Keterbatasan akses ini menunjukkan akuntabilitas masih bersifat internal.

b. Pertanggungjawaban Bahan Pangan

Kepala SPPG bertanggung jawab atas pengadaan hingga distribusi bahan. Juknis telah menyediakan format laporan belanja, kartu stok, dan stok opname.

Namun, dokumentasi tersebut tidak dapat diakses publik, sehingga akuntabilitas administratif tidak sepenuhnya diikuti keterbukaan informasi.

c. Tindak Lanjut Aduan

Aduan dari sekolah atau siswa ditindaklanjuti melalui koordinasi langsung, namun mekanismenya masih lisan dan tanpa dokumentasi resmi.

Kondisi ini menyulitkan penelusuran, evaluasi, dan pembelajaran institusional. Penanganan aduan cenderung reaktif, bukan preventif, sehingga akuntabilitas belum optimal.

Faktor Penghambat

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama tata kelola MBG di Kota Kupang:

- a. Sentralisasi kewenangan di BGN, membatasi ruang partisipasi dan transparansi lokal.
- b. Lemahnya sistem dokumentasi dan prosedur baku, terutama dalam penanganan aduan dan koordinasi lintas instansi.

- c. Keterbatasan juknis dalam aspek partisipatif dan sosialisasi, sehingga pelibatan siswa dan sekolah kurang optimal.
- d. Kekhawatiran sosial dan risiko reputasi, yang mendorong praktik pengelolaan lebih tertutup.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kupang sudah berjalan secara administratif sesuai petunjuk teknis, namun belum terlaksana secara utuh, terpadu, dan partisipatif. Pada aspek pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan masih bersifat sentralistik serta kurang melibatkan sekolah dan siswa, sementara pemilihan pemasok, distribusi, dan pengendalian kualitas makanan masih memiliki kelemahan. Dari sisi transparansi, informasi program lebih bersifat internal dan terpusat sehingga akses sekolah dan masyarakat terbatas, serta sosialisasi kepada siswa belum optimal. Pada aspek akuntabilitas, pelaporan dilakukan secara formal, tetapi pengawasan publik dan tindak lanjut aduan belum terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, program masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan perlu penguatan partisipasi, keterbukaan, serta sistem pengawasan yang lebih terstruktur agar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan gizi siswa.

Saran

Secara umum, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dengan mengurangi sentralisasi, melibatkan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan secara aktif, memperkuat transparansi informasi, membangun sistem pengawasan dan aduan yang jelas, serta mendorong pemanfaatan pangan lokal agar program berdampak nyata dan berkelanjutan. SPPG diharapkan lebih terbuka dalam penyampaian informasi dan bersikap profesional dalam memberikan akses data agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekolah perlu meningkatkan sosialisasi kepada siswa melalui penjelasan yang jelas dan media informasi visual agar pelaksanaan program lebih transparan dan dipahami bersama. Sementara itu, peneliti diharapkan memperdalam kajian, menjaga etika dan objektivitas, serta membangun koordinasi yang baik agar hasil penelitian dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola program.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(3), 215-226.
- Anggara, S. (2012). Perbandingan administrasi negara (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of public administration research and theory*, 28(1), 16-32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American planning association*, 85(1), 24-34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Bourne, L. (2015). Making projects work: Effective stakeholder and communication management. CRC press. <https://doi.org/10.1201/b18100>
- de Lange, A. M. G., & Cole, J. H. (2020). Commentary: Correction procedures in brain-age prediction. *NeuroImage: Clinical*, 26, 102229. <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2020.102229>
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14-21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14-21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2021). Introduction-Digital government and public management research: finding the crossroads. *Digital Government and Public Management*, 1-14. <https://doi.org/10.4324/9781003258742-1>
- Idrus, M. (2009: 91). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara.
- Irawan, B., & Ainy, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, s9(3), 189-197. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.3.189-197>
- Johnston, M. (2006). Good governance: Rule of law, transparency, and accountability. New York: United Nations Public Administration Network, 1, 32.
- Kaufmann, D., A. Kraay, dan P. Zoido-Lobaton, (2000), *Governance Matters: From Measurement to Action*, Finance and Development, 37(2), Washington DC: International Monetary Fund.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5967](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5967)
- Lloyd, R., & Aho, W. (2020). The Four Functions of Management-An essential guide to Management Principles.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2009). Penelitian kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mustafa, R. A., Santesso, N., Brozek, J., Akl, E. A., Walter, S. D., Norman, G., ... & Schünemann, H. J. (2013). The GRADE approach is reproducible in assessing the quality of evidence of quantitative evidence syntheses. *Journal of clinical epidemiology*, 66(7), 736-742. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.02.004>
- Nadjib, I. A., Khairunnas, S., & Pol, M. I. (2024). *Teori administrasi publik: buku ajar*.
- Nazir M. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia
- Ostrom, E. (2007). A diagnostic approach for going beyond panaceas. *Proceedings of the national Academy of sciences*, 104(39), 15181-15187. <https://doi.org/10.1073/pnas.0702288104>
- Pierre, J., & Peters, B. (2005). *Governing complex societies: Trajectories and scenarios*. Springer. <https://doi.org/10.1057/9780230512641>
- Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian journal of intellectual publication*, 5(2), 130-137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Qomarullah, R., Suratni, Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130-137 <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Sarwano, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). *Dinamika Governance: Teori, Praktek, dan Implikasi Kebijakan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191-196
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191-196.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2)*. Alfabeta.
- Sujarwoto, S. (2013). *Essays on decentralisation, public services and well-being in Indonesia*. The University of Manchester (United Kingdom).
- Susilawati, S., & Kushendar, D. H. (2023). *Teori Administrasi Publik Menggali Dasar-Dasar Pemerintahan Modern*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Tihanyi, L., Graffin, S., & George, G. (2014). Rethinking governance in management research. *Academy of Management journal*, 57(6), 1535-1543. <https://doi.org/10.5465/amj.2014.4006>
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1-10.